**Kebijakan Luar Negeri RI pada periode 1998 – 2004: Periode Transisi dari Otoriterisme Menuju Demokrasi:**

1. Isu-isu penting di tingkat domestik maupun internasional:
   1. Isu **keutuhan bangsa** (*national unity*) NKRI karena periode transisi dari otoriterisme ke demokrasi di negara berkembang dicirikan oleh maraknya gerakan separatis dan bentuk *intra-state conflict* lainnya karena terjadi mobilisasi sentiment primordial (SARA) untuk tujuan elektoral dan kekuasaan. Rezim yang lama belum sepenuhnya runtuh atau bubar dan kekuasaan yang baru belum terkonsolidasi dengan baik. Tantangannya adalah bagaimana mengelola keragaman Indonesia dalam kerangka politik demokrasi melalui kontestasi elektoral dan perdebatan di DPR.
   2. Indonesia memasuki **krisis ekonomi dan pemulihannya** di bawah pengawasan IMF dan Bank Dunia sebagai implikasi dari kebijakan ekonomi neoliberal (debirokratisasi dan deregulasi perbankan) pada era 1990an yang tidak disertai dengan perkiraan secara cermat resiko nilai tukar rupiah dan pentingnya *good governance* ketika Indonesia mengintegrasikan ekonominya ke dalam kapitalisme global.
   3. Indonesia menghadapi isu **pelanggaran HAM** pasca Jajak Pendapat Timor Timur tahun 1999 yang berujung pada Intervensi Kemanusiaan oleh DK PBB dan embargo senjata oleh AS. Reformasi TNI menghadapi tantangan yang luar biasa menuju prinsip supremasi sipil sebagai bagian dari proses demokratisasi. Ada pertarungan antara pemimpin sipil dan TNI yang berujung pada impeachment Presiden Abdurrahman Wahid (Gud Dur).
   4. Isu **keamanan dalam negeri** yang tidak hanya menghadapi gerakan separatis di daerah (ACEH) dan konflik primordial (Ambon dan daerah lainnya) tetapi juga terorisme yang marak (sejak Peristiwa 9/11 di AS) seperti Bom Bali I dan II. Penyaluran aspirasi politik melalui partai politik dan pemilu tidak diterima oleh kelompok teroris yang mengatasnamakan agama sehingga menempuh cara kekerasan untuk meraih kekuasaan.
2. **Era Presiden B. J. Habibie 1998 – 1999**:
   1. Era transisi ke demokrasi Indonesia mendapat dukungan internasional setelah kejatuhan Soeharto untuk melakukan transisi ke demokrasi (pembebasan tahanan politik, kebebasan pers, UU Kepartaian dan Pemilu yang bebas dan jurdil, civil and political rights).
   2. Persiapan dan pelaksanaan pemilu pertama di era reformasi 1999.
   3. Kerjasama dengan IMF untuk pemulihan dari krisis ekonomi sejak 1998 (bail out di bawah pengawasan MF). Pertumbuhan ekonomi negatif dan melemahnya mata uang rupiah secara signifikan.
   4. Meningkatnya konflik separatis di Aceh dan Papua serta konflik sektarian di Ambon (Maluku): stabilitas politik dan keamanan dalam negeri goyah.
   5. Hubungan dengan ASEAN khususnya Singapore di bawah Habibie kurang harmonis karena statement Habibie di media yang meremehkan negara tetangga tsb.
   6. Hubungan dengan Australia juga kurang harmonis karena membawa atau melaporkan masalah Timor Timur ke Dewan Keamanan PBB padahal dulu tahun 1970an Australia ikut mendukung invasi ke Timor Timur.
   7. Dimulainya reformasi TNI dari Dwi-Fungsi ABRI menuju TNI yang profesional dan di luar politik.
   8. Dimulainya penyelesaian konflik di Aceh secara damai dengan mediator internasional.
   9. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di bawah Habibie mendominasi birokrasi pemerintahan di pusat dan daerah.
3. **Era Presiden Abdurrahman Wahid 1999 – 2001**
   1. Dalam Sidang Umum MPR tahun 1999 Abdurrahman Wahid dari PKB terpilih sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden.
   2. Kementerian Luar Negeri dipimpin bukan oleh diplomat karier tetapi “orang parpol” Alwhi Sihab dari PKB.
   3. Gus Dur melontarkan gagasan kerjasama Indonesia- China dan India sebagai negara berkembang terkemuka.
   4. Integrasi bangsa menjadi masalah utama karena merebaknya berbagai konflik separatis dan primordial di daerah (Ambon, Poso, Kalimantan Barat, Aceh dan Papua.
   5. Gus Dur memelopori pluralisme politik terutama pengakuan terhadap budaya Tionghoa.
   6. Konflik semakin tajam antara Presiden dengan DPR
   7. Gus Dur banyak melakukan perjalanan luar negeri untuk pemulihan krisis ekonomi dan dukungan keutuhan NKRI.
   8. ABRI tidak menyukai penyelesaian konflik secara damai di Aceh melalui mediasi NGO internasional dan campur tangan Gus Dur dalam pengangkatan pimpinan militer.
   9. Pada bulan Juni 1999 Gus Dur di “impeach” oleh DPR atas kerjasama Golkar, PDIP dan militer.
4. **Era Presiden Megawati Soekarnoputri 2001 – 2004:**
   1. Megawati Soekarnoputri menggantikan Gus Dur tahun 2001.
   2. Terjadi Peristiwa 9/11 di AS dan Megawati adalah Kepala Negara pertama yang diterima oleh Presiden Bush di Gedung Putih.
   3. Indonesia mendukung langkah Bush memerangi terorisme tetapi ketika tiba di tanah air Megawati memperhitungkan dukungan kelompok Muslim di DPR mengoreksi pernyataannya di Washington.
   4. Terjadi ledakan Bom Bali I Oktober 2001 yang merupakan terbesar sesudah 9/11.
   5. Indonesia dituduh menjadi “sarang terorisme” dengan beroperasinya Jemaah Islamiyah sebagai agen Al Qaedah di Indonesia.
   6. Indonesia terus melakukan pemulihan dari krisis ekonomi antara lain dengan penjualan aset-aset negara kepada swasta asing guna mendapatkan dana segar untuk pembiayaan utang dan pembangunan.
   7. Indonesia mendapatkan bantuan asing dan investasi dari China dan sebagai imbalannya Indonesia memberikan konsesi kepada perusahaan asal China antara lain pembelian gas alam Tanggu di Papua dengan harga di bawah harga pasar sehingga perlu dinegosiasikan kembali.
   8. Pemberlakuan Darurat Militer (DOM) tahun 2003 di Aceh yang menjurus pelanggaran HAM.
   9. SBY yang Menkopolkam mendirikan Partai Demokrat dan menang pilpres 2004, awal “permusuhan politik” antara keduanya sampai sekarang.
   10. Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN di Bali tahun 2003 di mana disepakati Bali Concord II: 3 pilar ASEAN Economic Community, ASEAN Political and Security Community, ASEAN Social and Cultural Community.